



Konstelasi Politik Identitas dalam Dinamika Pembentukan Provinsi Papua Selatan

Fransin Kontu¹, Hubertus Oja², Imelda C. Laode³

¹ Program Studi Ilmu Politik, Universitas Musamus Indonesia

² Program Studi Pembangunan Sosial, Universitas Musamus, Indonesia

³ Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Musamus, Indonesia

Email: fransin@unmus.ac.id

Received: 10-10-2025

Accepted: 15-11-2025

Published: 15-12-2025

Abstrak

Pembentukan Provinsi Papua Selatan pada tahun 2022 menghadirkan dinamika politik identitas yang kompleks dan berlapis, melibatkan negara, elite lokal, dan masyarakat adat dalam proses pemekaran daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana politik identitas dikonstruksi, diperebutkan, dan dimobilisasi dalam konteks pembentukan provinsi baru tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus intrinsik, penelitian dilakukan di empat kabupaten, Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel., melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, serta analisis dokumen kebijakan dan literatur ilmiah. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan makna dalam dinamika identitas yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas memainkan peran ganda: sebagai narasi pemersatu untuk melegitimasi pemekaran dan sebagai sumber fragmentasi akibat diferensiasi identitas sub-etnis. Elite lokal memanfaatkan identitas kultural dan historis untuk memperoleh legitimasi politik, sementara masyarakat adat menggunakan identitas sebagai alat negosiasi representasi dan kontrol atas sumber daya. Di sisi lain, negara menempatkan pemekaran sebagai strategi stabilisasi dan percepatan pembangunan. Perbedaan orientasi ini menciptakan ruang negosiasi yang terus berlangsung dalam konsolidasi pemerintahan Papua Selatan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan provinsi baru bergantung pada kemampuan mengelola identitas secara inklusif, memastikan representasi OAP, dan mencegah dominasi elite dalam struktur kekuasaan daerah.

Kata Kunci: *Politik Identitas, Pemekaran Daerah, Papua Selatan, Elite Lokal, Masyarakat Adat.*

PENDAHULUAN

Pembentukan Provinsi Papua Selatan pada tahun 2022 merupakan salah satu momen politik paling signifikan dalam sejarah kontemporer Papua. Proses pemekaran ini tidak hanya dipahami sebagai kebijakan administratif semata, tetapi juga sebagai arena artikulasi politik identitas yang melibatkan relasi kompleks antara negara, elite lokal, dan masyarakat adat Papua. Dalam konteks Papua, identitas etnis, kultural, dan historis telah lama menjadi fondasi bagi tuntutan pengakuan politik, distribusi kekuasaan, dan perbaikan kesejahteraan (Widjojo et al., 2010; Elmslie & Webb-Gannon, 2013). Karena itu, dinamika pemekaran provinsi tidak terlepas dari kontestasi identitas

Orang Asli Papua (OAP), strategi elite, serta konstruksi representasi politik yang terus mengalami perubahan.

Diskursus politik identitas semakin menguat dalam dua dekade terakhir seiring berkembangnya studi mengenai bagaimana kelompok sosial menggunakan identitas untuk memengaruhi kebijakan dan memperoleh sumber daya politik (Fearon, 2011; Chandra, 2012). Dalam konteks Indonesia, politik identitas kerap tampil dalam isu etnisitas, agama dan kedaerahan, terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki sejarah marginalisasi struktural seperti Papua (Aspinall, 2011; Mietzner & Muhtadi, 2020). Pembentukan Provinsi Papua Selatan, oleh karena itu, tidak dapat dipisahkan dari proses politisasi identitas OAP yang menuntut pengakuan atas sejarah panjang ketidaksetaraan pembangunan, dominasi politik pusat, dan aspirasi otonomi yang lebih luas (ICG, 2020; Timmer, 2021).

Lebih spesifik, Papua Selatan menghadirkan konfigurasi politik identitas yang bersifat multilevel. Di satu sisi, terdapat narasi besar mengenai identitas “Papua” yang menjadi basis desakan pemekaran untuk memperkuat pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Di sisi lain, terdapat identitas sub-etnis seperti Marind, Asmat, Awyu, dan Korowai dan Kimaam yang memiliki kepentingan berbeda terkait representasi dalam struktur pemerintahan baru (Kirksey, 2012; Stasch, 2019). Keragaman identitas ini membuka ruang kompetisi baru dalam penentuan elite politik, distribusi jabatan pemerintahan, serta akses terhadap alokasi fiskal pasca pemekaran (Budiatri, 2019).

Selain itu, pemekaran Papua Selatan juga dipengaruhi oleh agenda politik nasional yang menempatkan DOB (Daerah Otonom Baru) sebagai instrumen stabilisasi keamanan dan percepatan pembangunan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran sering kali justru mendorong munculnya “elite capture” dan politisasi identitas lokal demi memperoleh keuntungan politik dan ekonomi (Kontu, 2025). Dalam konteks Papua, dinamika ini semakin kompleks karena identitas etnis dan kultural bukan hanya alat mobilisasi politik, tetapi juga simbol eksistensi historis yang melekat dalam hubungan negara-masyarakat (Webb-Gannon, 2018).

Melihat kompleksitas tersebut, penting untuk menelaah bagaimana politik identitas bekerja dalam proses pembentukan Provinsi Papua Selatan, siapa aktor yang terlibat, narasi apa yang digunakan, serta bagaimana kontestasi identitas tersebut memengaruhi struktur politik dan sosial pasca pemekaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah kajian tentang hubungan antara DOB dan politik identitas di Papua, terutama dalam konteks daerah baru yang masih dalam tahap konsolidasi pemerintahan dan pencarian bentuk identitas kolektifnya.

METODE PENELITIAN

Untuk memahami dinamika politik identitas selama proses pembentukan Provinsi Papua Selatan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena isu politik

identitas berkaitan dengan konstruksi makna, representasi sosial, hubungan kekuasaan, dan dinamika aktor yang tidak dapat dijelaskan dengan data kuantitatif. Pendekatan kualitatif, seperti yang dinyatakan oleh Creswell (2013) dan Denzin dan Lincoln (2018), memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kisah, pengalaman, dan strategi aktor dalam konteks sosial-politik yang kompleks, termasuk fenomena pemekaran wilayah Papua.

Menurut Yin (2014), desain penelitian ini adalah studi kasus intrinsik yang berfokus pada fenomena tertentu, pemekaran Provinsi Papua Selatan. Penggunaan studi kasus ini memungkinkan penjelasan mendalam tentang fenomena modern, yang batas antara konteks dan peristiwa penelitian tidak sepenuhnya jelas. Studi ini dilakukan di wilayah Papua Selatan, yang meliputi Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel. Wilayah ini memiliki keragaman identitas sub-etnis (Marind, Auyu, Asmat, dan Mappi), dan juga menjadi pusat perselisihan politik identitas terkait pembentukan DOB menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022. Lokasi dipilih secara acak untuk mencerminkan dinamika sosial-politik terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik identitas memainkan peran penting dalam proses pemekaran daerah, seperti yang ditunjukkan oleh pembentukan Provinsi Papua Selatan. Identitas etnis, sejarah hubungan negara-Papua, dan kepentingan elit lokal dan nasional saling berkelindan membentuk konfigurasi yang kompleks, menurut temuan penelitian. Dalam perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan pembagian kekuasaan di provinsi baru, politik identitas bukan hanya dibicarakan tetapi juga digunakan sebagai alat mobilisasi, legitimasi, dan mediasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa narasi historis dan kultural membentuk identitas "Papua Selatan". Ini menekankan perbedaan antara wilayah selatan dari konteks politik Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Fakta bahwa Marind adalah kelompok etnis dominan di Merauke, Asmat dengan budaya dan upacaranya, serta Auyu dan Mappi yang merupakan bagian dari mosaik identitas selatan digunakan untuk mendukung gagasan bahwa pemekaran adalah kebutuhan kultural dan sosial untuk memastikan representasi yang lebih adil. Hasil ini sejalan dengan pendapat Timmer (2021), yang menyatakan bahwa identitas lokal Papua sering dipolitisasi untuk mencari ruang kekuasaan baru dalam struktur pemerintahan daerah.

Di sisi lain, terdapat dinamika diferensiasi identitas yang cukup tajam antar-kelompok sub-etnis. Elite Marind, misalnya, memosisikan diri sebagai aktor utama dalam perumusan masa depan Papua Selatan, terutama karena Merauke menjadi ibu kota provinsi. Posisi ini memunculkan ketegangan identitas dengan kelompok etnis lain yang merasa khawatir terhadap dominasi politik tertentu pasca pemekaran. Hal ini meneguhkan temuan Webb-Gannon (2018) bahwa politik identitas di Papua sering kali menciptakan kompetisi horizontal, bukan hanya relasi vertikal antara negara dan masyarakat Papua.

Selain itu, proses pembentukan DOB membuka ruang bagi

persaingan elite lokal yang memanfaatkan identitas etnis untuk membangun legitimasi politik. Beberapa elite menggunakan narasi representasi OAP untuk mendapatkan dukungan publik maupun kepercayaan dari pemerintah pusat. Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut Vel (2020) sebagai *elite capture*, yakni ketika pemekaran daerah dimanfaatkan sebagai instrumen memperoleh akses terhadap jabatan politik, anggaran, dan sumber daya ekonomi yang meningkat setelah terbentuknya provinsi baru.

Pembahasan mengenai peran negara juga muncul dalam temuan penelitian. Pemerintah pusat mengartikulasikan pemekaran Papua Selatan sebagai bagian dari strategi percepatan pembangunan, stabilitas keamanan, dan penguatan tata kelola melalui pendekatan kewilayahan. Namun, narasi pembangunan tersebut sering kali bertabrakan dengan persepsi masyarakat setempat yang melihat pemekaran sebagai alat pengakuan identitas dan otonomi politik. Situasi ini menguatkan kajian Aspinall (2011) dan Mietzner & Muhtadi (2020) yang menegaskan bahwa kebijakan negara di daerah beridentitas kuat cenderung melahirkan transformasi hubungan kekuasaan yang tidak selalu linear dengan tujuan kebijakan.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan cara elite nasional dan lokal memaknai pemekaran. Elite nasional cenderung menekankan stabilitas politik dan peningkatan layanan publik sebagai tujuan utama. Sementara itu, elite lokal lebih menonjolkan aspek sejarah, kultural, dan aspirasi representasi OAP. Ketegangan antara dua cara pandang ini melahirkan proses negosiasi yang melelahkan, terutama dalam penentuan struktur organisasi provinsi baru, penempatan birokrat, hingga distribusi jabatan politik strategis. Hasil ini sejalan dengan analisis Fitran, Hofman, & Kaiser (2019), bahwa pemekaran di Indonesia sering kali menjadi arena perebutan sumber daya kekuasaan ketimbang instrumen perbaikan tata kelola.

Selain elite dan negara, masyarakat adat memainkan peran penting dalam mengartikulasikan politik identitas. Tokoh adat Marind, Awyu, dan Asmat menggunakan forum adat untuk menyuarakan aspirasi mengenai posisi politik, hak wilayah, dan peran strategis dalam pemerintahan baru. Mereka menegaskan bahwa pemekaran tidak boleh melahirkan struktur kekuasaan yang mengabaikan hak-hak kultural dan tanah adat. Temuan ini mencerminkan argumen Abbas (2016) tentang bagaimana masyarakat adat Papua menggunakan identitas kultural untuk menegosiasikan ruang dalam struktur negara modern.

Dalam keseluruhan proses, politik identitas berfungsi sebagai dua hal sekaligus: alat konsolidasi dan alat fragmentasi. Di satu sisi, identitas Papua Selatan menjadi wacana kolektif yang mempersatukan empat kabupaten dalam aspirasi membentuk provinsi baru. Di sisi lain, diferensiasi identitas sub-etnis justru memicu kontestasi internal mengenai representasi dan distribusi kekuasaan. Dualitas ini memperlihatkan bahwa politik identitas tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan terus berubah mengikuti kepentingan aktor serta konteks politik yang berkembang.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran Papua Selatan bukan sekadar proses administratif, melainkan arena kontestasi identitas yang melibatkan negara, elite lokal, dan masyarakat adat. Konstelasi politik identitas ini akan terus bertransformasi seiring proses konsolidasi pemerintahan berjalan, pembentukan institusi daerah berlangsung, dan distribusi kekuasaan terus dinegosiasikan. Dengan demikian, politik identitas menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam memahami arah pembangunan, tata kelola, dan struktur politik Papua Selatan ke depan.

Selain dinamika antar-elite dan masyarakat adat, penelitian juga menemukan bahwa proses pemekaran Papua Selatan turut dipengaruhi oleh konstruksi identitas yang dibentuk melalui media, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan. Media lokal dan nasional memainkan peran penting dalam memproduksi narasi tentang urgensi pemekaran, terutama dengan menonjolkan isu ketertinggalan pembangunan, kesenjangan geografis, dan pentingnya otonomi baru sebagai jalan menuju kesejahteraan. Namun, framing media ini sering kali menyederhanakan kompleksitas identitas lokal, sehingga meningkatkan jarak persepsi antara realitas sosial masyarakat adat dan narasi pembangunan yang digagas oleh pemerintah pusat. Temuan ini sejalan dengan studi Elmslie & Webb-Gannon (2013) yang menyoroti bagaimana representasi Papua di media dapat memengaruhi arah kebijakan sekaligus memperkuat stereotip tertentu.

Di tingkat komunitas, organisasi keagamaan juga menjadi aktor penting dalam penguatan identitas dan konsolidasi posisi politik masyarakat. Gereja-gereja lokal, misalnya, tidak hanya menjadi ruang spiritual, tetapi juga arena penyampaian aspirasi mengenai representasi politik, hak-hak OAP, dan partisipasi dalam struktur provinsi baru. Peran gereja dalam dinamika sosial-politik Papua telah lama dicatat oleh berbagai peneliti, termasuk Stasch (2019), yang menunjukkan bahwa lembaga keagamaan memiliki legitimasi moral yang kerap melebihi institusi formal pemerintah. Dalam konteks pemekaran, legitimasi moral ini digunakan untuk mendorong agar suara masyarakat adat mendapatkan ruang lebih besar dalam perancangan awal kebijakan provinsi baru.

Penelitian juga menunjukkan bahwa politik identitas di Papua Selatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh dinamika eksternal seperti kebijakan Otonomi Khusus Papua serta relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Berlakunya UU Otsus—baik versi 2001 maupun revisi 2021—memberikan ruang bagi penguatan identitas OAP melalui alokasi dana, afirmasi jabatan politik, dan perlindungan hak adat. Namun, implementasi kebijakan Otsus di Papua Selatan belum sepenuhnya merata, sehingga memunculkan ketegangan mengenai siapa yang berhak menikmati manfaatnya. Elite tertentu menggunakan Otsus sebagai legitimasi memperjuangkan kepentingan

politik mereka, sementara masyarakat adat menilai bahwa realisasi kesejahteraan belum sejalan dengan ekspektasi. Situasi ini memperlihatkan bahwa Otsus dan DOB berjalan saling memengaruhi, tetapi tidak selalu harmonis.

Dari perspektif hubungan pusat-daerah, hasil penelitian mengungkapkan adanya ketidaksinkronan antara visi pembangunan pemerintah pusat dan kebutuhan riil masyarakat Papua Selatan. Pemerintah pusat memandang pemekaran sebagai solusi teknokratis untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan efektivitas layanan publik, dan memperkuat stabilitas keamanan. Namun, masyarakat lokal menempatkan pemekaran sebagai proses politik yang berkaitan dengan pengakuan martabat, sejarah, dan hak kolektif. Ketidaksinkronan ini melahirkan potensi disonansi antara kebijakan negara dan aspirasi masyarakat yang dapat memengaruhi kelegitimian pemerintahan provinsi baru.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa politik identitas dalam pembentukan Papua Selatan tidak hanya beroperasi pada tingkat simbolik, tetapi juga pada level material melalui perebutan sumber daya. Pemekaran membuka akses baru terhadap anggaran negara, termasuk Dana Otsus, Dana Transfer ke Daerah, dan peluang penempatan jabatan strategis. Hal ini memicu persaingan yang lebih intens antar-elite lokal dan antar-kabupaten mengenai alokasi anggaran, pembangunan infrastruktur prioritas, hingga pemilihan lokasi kantor-kantor OPD provinsi. Persaingan ini memperkuat argumen bahwa identitas bukan sekadar alat perjuangan simbolik, melainkan juga instrumen untuk menentukan posisi dalam struktur ekonomi-politik yang sedang dibangun.

Tantangan lain yang muncul dalam konsolidasi Papua Selatan adalah bagaimana pemerintah provinsi baru menata birokrasi yang inklusif dan tidak tersandera oleh politik identitas yang sempit. Penempatan ASN dan pejabat struktural menjadi isu sensitif karena berkaitan langsung dengan representasi etnis dan persepsi keadilan. Beberapa kelompok etnis merasa diuntungkan karena kedekatan geografis atau relasi sejarah dengan pusat pemerintahan, sementara kelompok lain merasa termarjinalkan dalam proses awal pengisian jabatan. Jika tidak dikelola dengan baik, dinamika ini berpotensi menciptakan ketidakpercayaan jangka panjang terhadap institusi pemerintah provinsi.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa politik identitas dalam pembentukan Provinsi Papua Selatan bersifat multidimensional—melibatkan aspek historis, kultural, ekonomi, politik, dan simbolik secara bersamaan. Identitas berfungsi sebagai sumber daya politik yang dapat digunakan untuk memobilisasi dukungan, membangun legitimasi, dan mengatur relasi kekuasaan dalam provinsi baru. Namun, identitas juga dapat menjadi sumber fragmentasi yang memperlambat proses konsolidasi pemerintahan apabila tidak ditangani dengan pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap keragaman kelompok.

Dengan demikian, keberlanjutan pembangunan di Papua Selatan

sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengelola politik identitas secara bijak. Diperlukan desain kelembagaan yang mampu menyeimbangkan kebutuhan representasi, distribusi sumber daya, dan stabilitas politik, tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang menjadi fondasi identitas kolektif Papua Selatan. Hanya dengan demikian, provinsi baru ini dapat berkembang sebagai entitas politik yang legitim, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabel 1. Analisis Tematik Politik Identitas dalam Proses Pembentukan Provinsi Papua Selatan

No	Tema Utama	Temuan Lapangan	Implikasi Analitis
1	Konstruksi Identitas Papua Selatan	Identitas dibangun melalui narasi sejarah, budaya, dan geografis Selatan yang berbeda dari Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Sub-etnis Marind, Asmat, Mappi, dan Auyu menonjol dalam legitimasi pemekaran.	Identitas berfungsi sebagai <i>discursive tool</i> untuk menegaskan kebutuhan pemekaran dan membangun klaim representasi politik dan kultural.
2	Diferensiasi Identitas Sub-Etnis	Ketegangan antara etnis Marind dan kelompok lain muncul dalam wacana representasi dan penempatan jabatan. Merauke dipandang dominan karena menjadi ibu kota provinsi.	Identitas menjadi sumber fragmentasi horizontal antar-kelompok, memperkuat kompetisi dalam struktur kekuasaan lokal.
3	Peran Elite Lokal dan Elite Capture	Elite memanfaatkan narasi keberpihakan pada OAP untuk memperoleh legitimasi dalam pemekaran, penentuan jabatan, dan akses pendanaan.	Pemekaran berpotensi dimanfaatkan untuk akumulasi kekuasaan dan sumber daya oleh kelompok tertentu, sesuai fenomena <i>elite capture</i> .
4	Narasi Negara tentang Pemekaran	Pemerintah pusat mendorong pemekaran atas dasar percepatan pembangunan, stabilitas keamanan, dan penataan wilayah administrasi.	Terdapat disonansi antara narasi teknokratis negara dan narasi identitas masyarakat adat yang lebih berfokus pada pengakuan politik.
5	Peran Masyarakat Adat	Forum adat digunakan untuk menyuarakan hak representasi, penataan	Politik identitas dipakai sebagai ruang negosiasi untuk

		wilayah adat, dan perlindungan tanah ulayat.	memastikan posisi masyarakat adat dalam struktur provinsi baru.
6	Kontestasi Jabatan dan Institusi Daerah	Persaingan kabupaten dalam penempatan OPD, jabatan ASN, dan distribusi anggaran muncul sejak awal transisi.	Menunjukkan bahwa identitas berkelindan dengan kepentingan materiil dan menjadi perebutan sumber daya birokrasi.
7	Pengaruh Otonomi Khusus (Otsus)	Kebijakan Otsus membentuk persepsi baru tentang hak-hak OAP dan struktur politik Papua Selatan, namun implementasinya tidak merata.	Interaksi Otsus-DOB menciptakan dinamika baru antara afirmasi identitas dan realitas distribusi kesejahteraan.
8	Peran Media dan Organisasi Keagamaan	Media memperkuat narasi pemekaran, sementara gereja menjadi arena konsolidasi identitas dan advokasi OAP.	Identitas tidak hanya diproduksi oleh aktor politik, tetapi juga oleh institusi moral dan ruang publik.
9	Relasi Pusat-Daerah	Terjadi perbedaan interpretasi antara pusat (stabilitas dan administrasi) dan daerah (pengakuan dan representasi).	Hubungan yang tidak sinkron dapat menghambat konsolidasi provinsi dan memengaruhi legitimasi pemerintahan baru.
10	Dualitas Identitas: Konsolidasi vs Fragmentasi	Identitas Papua Selatan mempersatukan empat kabupaten, tetapi perbedaan etnis memicu kontestasi internal.	Politik identitas bersifat dinamis, dapat memperkuat solidaritas, namun juga berpotensi melemahkan kohesi sosial-politik.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Papua Selatan bukan sekadar proses administratif atau kebijakan pemekaran wilayah, tetapi merupakan arena kontestasi politik identitas yang melibatkan negara, elite lokal, dan masyarakat adat. Identitas kultural dan historis kelompok-kelompok sub-etnis di wilayah selatan, seperti Marind, Awyu, Muyu, Korowai, Citak, Asmat, Mandobo, Kimaam, memainkan peran penting dalam melegitimasi aspirasi pemekaran, sekaligus menjadi dasar negosiasi representasi politik di dalam provinsi baru. Politik identitas berfungsi sebagai sumber mobilisasi dan alat

legitimasi yang dapat menyatukan aspirasi kolektif, namun pada saat yang sama memunculkan fragmentasi dan kompetisi horizontal antarkelompok dalam proses penataan pemerintahan daerah.

Dinamika ini memperlihatkan bahwa pemekaran Papua Selatan merupakan proses berlapis yang dipengaruhi oleh kepentingan elite, narasi pembangunan negara, serta tuntutan pengakuan OAP dalam struktur kekuasaan yang lebih setara. Negara memaknai pemekaran sebagai instrumen stabilitas dan percepatan pembangunan, sementara masyarakat dan elite lokal mengartikulasikannya sebagai peluang memperkuat identitas kultural dan memperoleh representasi politik yang lebih adil. Perbedaan cara pandang inilah yang membentuk relasi negosiasi yang terus berlangsung dalam proses konsolidasi provinsi baru.

Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan Papua Selatan sebagai daerah otonom baru sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengelola keberagaman identitas secara inklusif, mencegah dominasi elite tertentu melalui mekanisme representasi yang adil, serta memastikan bahwa pembangunan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat adat. Politik identitas akan terus menjadi faktor kunci yang memengaruhi arah tata kelola, hubungan sosial, dan stabilitas politik Papua Selatan ke depan. Oleh karena itu, desain kelembagaan, kebijakan pembangunan, dan penguatan pemerintahan perlu mempertimbangkan dinamika identitas ini secara komprehensif agar provinsi baru dapat berkembang secara lebih legitim, demokratis, dan berkelanjutan.

BIBLIOGRAPHY

- Abbas, Rafli. (2016). *Konstruksi Identitas Ke-Papua-an Di Kota Multi Kultural (Refleksi Kota Yogyakarta Dalam Kajian Identitas)*. Jurnal Politik Profetik, Vol 04, No.1
- Aspinall, E. (2011). *Democratization and ethnic politics in Indonesia*. Journal of East Asian Studies.
- Budiarti, A. (2019). *Indonesia: Negara Demokrasi Berkulitas Rendah*. Jurnal Penelitian Politik.
- Chandra, K. (2012). *Constructivist Theories of Ethnic Politics*. Oxford University Press.
- Elmslie, J., & Webb-Gannon, C. (2013). *A People's Geography of Papua*.
- Fearon, J. (2011). *Ethnic mobilization and political identity*. Annual Review of Political Science.
- Fitriani, F., Hofman, B., & Kaiser, K. (2019). The effects of Indonesia's decentralization on local governance. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*.
- ICG (International Crisis Group). (2020). *Indonesia: Approaching Papua's New Era*.
- Kirksey, E. (2012). *Freedom in Entangled Worlds: West Papua and the Architecture of Global Power*.
- Kontu, Fransin. (2025)
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2020). The rise of identity politics in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*.

- Fransin Kontu et al**, *Konstelasi Politik Identitas dalam Dinamika Pembentukan Provinsi Papua Selatan*
- Stasch, R. (2019). *Society of Others: Kinship and Mourning in a West Papuan Place*.
- Timmer, J. (2021). New regionalism and local identities in Papua. *Asia Pacific Journal of Anthropology*.
- Vel, J. (2020). Elite dynamics and resource politics in eastern Indonesia.
- Widjojo, M. et al. (2010). *Papua Road Map*.
- Webb-Gannon, C. (2018). Spheres of influence and Papuan identity politics. *Oceania*.
- Bowen, G. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*.
- Braun, V., & Clarke, V. (2012). Thematic analysis. *APA Handbook of Research Methods*.
- Creswell, J. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design*.
- Denzin, N. & Lincoln, Y. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*.
- Lincoln, Y., & Guba, E. (2013). *Naturalistic Inquiry*.
- Yin, R. (2014). *Case Study Research: Design and Methods*.